

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, serta pengembangan wilayah, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia (Wirawan et al., 2022). Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan nasional melalui devisa, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, pendekatan dalam pembangunan pariwisata mengalami perubahan paradigma. Sebelumnya, pembangunan pariwisata umumnya dilakukan dengan pendekatan top-down, dimana kebijakan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah atau pihak investor tanpa partisipasi masyarakat lokal. Penerapan kebijakan yang masih berorientasi pada pendekatan atas ke bawah tersebut menyebabkan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, baik pada tahap perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan (Setyorini, 2004). Pergeseran ini didorong oleh kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat setempat sebagai pemilik langsung dari sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata.

Salah satu pendekatan dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis komunitas. Pariwisata berbasis komunitas merupakan konsep yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan hasilnya. Partisipasi masyarakat dalam proses tersebut berperan sebagai mekanisme pengawasan yang efektif serta memastikan bahwa pengembangan suatu objek wisata berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Wijaya & Sudarmawan, 2019). Berbeda dengan

pendekatan konvensional yang sering kali menjadikan masyarakat hanya sebagai penonton atau tenaga kerja, pariwisata berbasis komunitas menempatkan masyarakat sebagai aktor utama (subjek) yang memiliki hak dan kendali penuh terhadap kegiatan pariwisata di wilayah mereka sendiri.

Selain itu, dengan pendekatan pariwisata berbasis komunitas menegaskan bahwa terdapat prinsip utama dalam strategi perencanaan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Prinsip – prinsip tersebut meliputi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, jaminan bahwa masyarakat lokal memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata, serta penyediaan fasilitas jasa, dan pelatihan di bidang kepariwisataan bagi masyarakat setempat (Yusita & Duadji, 2022). Melalui keterlibatan masyarakat lokal, pariwisata berbasis komunitas mendorong terjadinya alih pengetahuan dan penguatan kapasitas yang secara langsung meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Selain itu, keterlibatan langsung dalam kegiatan pariwisata menjadikan masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dan budaya, karena mereka menyadari bahwa keberlanjutan atraksi wisata bergantung pada kelestarian elemen-elemen tersebut. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar serta mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan demi keuntungan jangka pendek.

Namun, penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas juga memiliki tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan promosi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat setempat agar mereka dapat lebih memahami dan mengelola pariwisata dengan baik. Selain itu, keberhasilan pariwisata berbasis komunitas juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan pelaku industri pariwisata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan agar pariwisata berbasis komunitas dapat berkembang dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pentingnya untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas

dalam konteks lokal Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata tinggi namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaannya..

Pantai Cemara, terletak di Desa Mojomulyo, tepatnya di Jl. Lintas Selatan, Kalimalang, Mojomulyo, Kec. Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Tempat ini adalah contoh nyata bagaimana wisata bahari yang awalnya sederhana dan kurang dikenal dapat berkembang menjadi pusat ekonomi kreatif yang dinamis. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan popularitas pantai tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pantai Cemara merupakan salah satu destinasi wisata alam yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas. Daya tarik berupa hamparan pasir, keasrian pepohonan cemara, serta aktivitas wisata seperti kuda, perahu dan fotografi lingkungan menjadikan Pantai Cemara memiliki nilai jual yang tinggi. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh masyarakat setempat. Beberapa permasalahan yang kerap muncul di destinasi wisata berbasis komunitas juga terjadi di Pantai Cemara seperti koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan dengan efektif, struktur kelembagaan belum kuat, partisipasi masyarakat belum merata secara aktif dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Desa & Margayaningsih, 2018) di Desa Waung bahwa peran masyarakat dalam rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pelatihan keterampilan wisata, belum optimalnya kelembagaan pengelola, serta terbatasnya promosi dan infrastruktur pendukung. Serta perlu adanya tahapan pemberdayaan yang harus diterapkan oleh masyarakat untuk menghasilkan pariwisata berbasis komunitas.

Hasil pra observasi dan wawancara dengan masyarakat setempat mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengelolaan Pantai Cemara sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mandiri dalam mengelola kawasan wisata, tetapi juga menunjukkan adanya kekurangan dukungan struktural yang seharusnya dapat membantu pengembangan destinasi secara lebih profesional dan berkelanjutan. Meski

demikian, kemandirian masyarakat dalam mengelola Pantai Cemara menunjukkan adanya modal sosial yang kuat. Kehadiran kelompok pengelola lokal, UMKM pesisir, serta komunitas peduli lingkungan menjadi peluang awal bagi pengembangan pariwisata berbasis komunitas di kawasan ini. Dengan strategi pemberdayaan masyarakat yang tepat, Pantai Cemara berpotensi menjadi destinasi wisata berbasis komunitas yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

Pantai dinilai sebagai salah satu aset terpenting bagi pemerintah daerah, mengetahui pengelolaan pantai harus memperoleh perhatian dari pemerintah. Salah satunya yang tercantum dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (Badan Pemeriksa Keuangan, 2007), pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan serta ekosistem pesisir. Setiap bentuk pemanfaatan, baik oleh individu, badan usaha, maupun pemerintah, wajib memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, serta dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak keseimbangan lingkungan (Kadir et al., 2025).

Di sisi lain, peluang pengembangan Pantai Cemara melalui strategi pemberdayaan masyarakat sangat terbuka lebar. Kehadiran kelompok sadar wisata, pengelola pantai, UMKM lokal, dan komunitas lingkungan menjadi pondasi awal dalam membangun pariwisata yang partisipatif. Dengan strategi yang tepat, pariwisata berbasis komunitas dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan produk wisata lokal, dan memperkuat identitas budaya sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dengan tahapan atau langkah – langkah pemberdayaan masyarakat yang perlu diterapkan untuk kesiapan masyarakat di sekitar Pantai Cemara agar menjadi pariwisata berbasis komunitas. Menurut (Maryani & Nainggolan, 2019) Tahapan tersebut mulai dari tahap persiapan hingga tahap terminasi.

Tahapan pemberdayaan masyarakat merupakan proses berkelanjutan yang bertujuan membangun kemandirian masyarakat. Proses ini diawali dengan tahapan

persiapan yang menyiapkan tenaga pemberdayaan dan kondisi lapangan agar program dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, dilakukan tahap pengkajian (*assessment*) untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta potensi dan sumber daya masyarakat sebagai dasar perencanaan program yang tepat sasaran berdasarkan hasil pengkajian, selanjutnya dilakukan tahap perencanaan alternatif program secara partisipasi dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan solusi yang paling efektif dan efisien. Rencana yang telah disepakati kemudian diformalkan dalam tahap rencana aksi sebagai pedoman pelaksanaan. Setelah menemukan rencana program dan disepakati bersama dari tahap pengkajian, dengan melanjutkan tahap implementasi yaitu dari program ini di lapangan dengan menekankan kerja.

Kerjasama antara petugas dan masyarakat serta sosialisasi program agar tujuan dan sasaran dipahami bersama. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan mengidentifikasi kendala dengan melibatkan masyarakat, sehingga terbentuk sistem pengawasan internal dan kemandirian komunitas. Tahap terakhir yaitu terminasi, penghentian tenaga pemberdayaan secara formal dengan harapan masyarakat telah mampu mengelola dan melanjutkan hasil pemberdayaan secara mandiri.

Urgensi penelitian ini terletak pada rumusan strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di Pantai Cemara. Tanpa strategi yang jelas, potensi wisata tidak akan berkembang optimal dan manfaatnya tidak akan dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan pariwisata berbasis komunitas diterapkan di Pantai Cemara, serta bagaimana peran masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Dengan memperhatikan dinamika tersebut, maka penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan konsep pariwisata berbasis komunitas dalam konteks lokal Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi wisata tinggi namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaannya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan pemahaman teoretis mengenai implementasi pariwisata berbasis komunitas, tetapi juga menawarkan rekomendasi

praktis bagi pengembangan pariwisata yang inklusif, adil, dan berkelanjutan berbasis masyarakat. Berdasarkan paparan di atas yang menjadi pertimbangan atau alasan penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata Berbasis Komunitas di Pantai Cemara Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terkait dengan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pariwisata Berbasis Komunitas di Pantai Cemara maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas di Pantai Cemara?
2. Bagaimana strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas di Pantai Cemara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas di Pantai Cemara.
2. Merumuskan strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata berbasis komunitas di Pantai Cemara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pariwisata berbasis komunitas. Selain itu, melalui penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji tingkat keberhasilan implementasi pariwisata berbasis komunitas di destinasi lain dengan karakteristik yang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi masyarakat di sekitar Pantai Cemara melalui pelatihan manajemen komunitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata berbasis komunitas. Pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata. Selain itu, meningkatnya partisipasi masyarakat mendorong tumbuhnya rasa memiliki terhadap Pantai Cemara sehingga pengelolaan wisata dapat berjalan lebih berkelanjutan.

b. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Jember dan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar evaluasi terhadap peran dan dukungan pemerintah dalam pengembangan pariwisata lokal, sehingga mendorong terwujudnya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.